

DISINTEGRASI DAN RADIKALISME: TANTANGAN AKTUALISASI PANCASILA DI TENGAH RIVALITAS NASIONALISME SEKULAR DAN RELIGIUS

Wirawan Sukarwo

Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Indraprasta PGRI
Email: wirawansukarwo@gmail.com

Abstrak: Sebagai sebuah falsafah bernegara, Pancasila dianggap sudah final dan mengikat. Namun, terdapat dualisme dalam penafsiran Pancasila di tengah masyarakat yang terbelah menjadi kelompok nasionalis sekular dan religius. Situasi ini beririsan dengan krisis identitas yang terus melanda bangsa bekas terjajah seperti Indonesia. Corak nasionalisme sekular yang dominan sejak era Orde Baru telah memunculkan resistansi dari kelompok nasionalis religius tatkala gejala serupa juga muncul di banyak belahan dunia. Resistansi yang semakin kuat ini bisa berujung pada radikalisme kelompok yang mengancam integrasi nasional. Makalah ini didasarkan pada penelitian berjenis kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan berupa tantangan faktual terkait aktualisasi Pancasila dalam bentuk rivalitas kelompok nasionalis religius dan sekular dalam konteks politik praktis di Indonesia. Rivalitas tersebut memiliki akar yang kuat pada dualisme penafsiran Pancasila itu sendiri serta bisa menjadi awal dari radikalisme yang mengancam integrasi bangsa.

Kata kunci: Pancasila, nasionalisme sekular, nasionalisme religius, radikalisme

Abstract: Pancasila is considered as final state philosophy in Indonesia. However, there is dualism in the interpretation of the Pancasila in the midst of a society divided into secular and religious nationalist groups. This situation intersects with an identity crisis that continues to hit former colonized nations such as Indonesia. The dominant form of secular nationalism since Orde Baru (New Order) era has led religious nationalist groups to resistance when similar symptoms also appear in many places of the world. Strong resistance in the other side can lead some group into radicalism that threatens Pancasila. This paper is based on a qualitative type of research with a literature study method. From the research results, it can be concluded that there are factual challenges related to the actualization of Pancasila in the form of rivalry between religious and secular nationalist groups in the context of political practices in Indonesia. This rivalry has strong roots in the dualism of the Pancasila's interpretation itself and can be the beginning of radicalism that threatens the national integration.

Key words: Pancasila, secular nationalism, religious nationalism, radicalism

PENDAHULUAN

Dalam rapat Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga (Renja K/L) di Komisi III DPR RI bulan September 2012, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Ansyad Mboi mengatakan bahwa banyak mahasiswa yang tidak lagi menerima Pancasila sebagai dasar negara. Data tersebut ia peroleh dari survei yang dilakukan oleh

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 5 kampus ternama di Pulau Jawa. Dalam survei itu juga didapatkan data bahwa sebagian besar mahasiswa merasa Pancasila tidak berimplikasi langsung pada kehidupan masyarakat yang terus menerus mengalami penderitaan.

(<https://news.detik.com/berita/2010669/bnpt-86--mahasiswa-di-5-universitas-tenar-di-jawa-tolak-pancasila?nd771104bcj=>). Di sisi lain, gejala radikalisme agama dan terorisme mulai marak kembali di belahan dunia. Fenomena kemunculan ISIS di Timur Tengah yang menjadi kelanjutan dari Al-Qaeda mulai mendekati kawasan Asia Tenggara. Beberapa aksi teror yang terjadi di Indonesia memiliki kaitan secara ideologis dengan organisasi seperti ISIS. Puncak keresahan tentu saja ketika terjadi tragedi Marawi di Philipina yang berjarak sangat dekat dengan wilayah Indonesia. Dengan sangat jelas dan terang benderang, narasi pembentukan negara Islam di Philipina menggunakan pola yang sama dengan apa yang dipraktikkan ISIS di Timur Tengah.

Dua variabel sebelumnya, yaitu ketidakpercayaan kelas intelektual (mahasiswa) terhadap Pancasila dan kemunculan radikalisme serta terorisme merupakan masalah yang menjadi latar pada makalah ini. Sejak hasil survei tersebut dirilis secara resmi, paradigma kontra-terorisme dan program deradikalisasi BNPT bahkan mulai disesuaikan dengan penancapan kembali nilai-nilai Pancasila, khususnya di lingkungan perguruan tinggi. Sayangnya, terdapat *split* pemahaman ketika istilah radikal justru tampak disematkan pada kelompok-kelompok yang memperjuangkan aspirasi umat Islam dalam koridor kebangsaan dan demokrasi.

Pada hari-hari belakangan ini sering terlihat narasi di tengah-tengah masyarakat tentang ke-Pancasilaan dan kebhinekaan. Tagar dan jargon *Saya Indonesia, Saya Pancasila* memenuhi ruang-ruang komunikasi media sosial sebagai bentuk selebrasi sekaligus propaganda visual. Fenomena ini tidak perah ada sebelumnya, meskipun demam media sosial sudah dimulai sejak satu dekade lalu. Fenomena selebrasi ke-Pancasilaan ini tentu saja memiliki latar

peristiwanya sendiri yang ternyata berakar pada masalah klasik yaitu pertarungan identitas antara nasionalisme sekular dan religius.

Jika merunut peristiwa sebelumnya, kontestasi Pilkada DKI tahun 2017 jelas telah membelah kembali masyarakat dalam dua kutub besar yaitu kelompok nasionalis sekular dan religius. Persaingan di antara dua kelompok ini sebenarnya sudah ada sejak era kemerdekaan dan telah diabadikan dalam catatan sejarah. Bedanya, pada era Presiden Soekarno, Orde Lama menginstitutionalisasi kelompok-kelompok tersebut secara politik melalui ideologi Nasakom (nasionalis-agama-komunis). Hasil dari proyek Nasakom ini adalah mewujudnya partai politik yang mengakomodasi aspirasi kelompok yang memiliki cara pandang atau pendekatan berbeda terkait nasionalisme.

Mereka yang berasaskan nasionalisme sekular bisa mendukung PNI (Partai Nasional Indonesia). Sedangkan mereka yang berasaskan Islam bisa diwakili Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) sebagai manifestasi religiusitas politik. Di sisi lain ada pula PKI (Partai Komunis Indonesia) yang pernah menjadi manifestasi pendekatan Marxisme-Leninisme pada politik nasional. Ketiga kelompok besar ini menjadi wadah politik identitas yang dinamis di Indonesia dalam kerangka nasionalisme sampai Orde Baru kemudian mengubahnya secara total.

Selama 32 tahun masa kekuasaan Orde Baru, politik aliran tidak diberi ruang untuk berekspresi. Setelah huru-hara ideologis tahun 1965 serta penumpasan gerakan-gerakan separatis religius, Orde Baru mengekalkan kekuasaan melalui instrumen militer dan otoritarianisme. Kelompok-kelompok Islam politik ditempatkan dalam wadah yang terlalu sempit bernama Partai Persatuan Pembangunan.

Sedangkan kelompok nasionalis sekular dijejalkan dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Kedua partai ini tidak pernah sekalipun menang dalam kancah Pemilu selama Orde Baru.

Setelah jatuhnya Orde Baru tahun 1998, geliat Islam politik di Indonesia kembali muncul setelah puluhan tahun tersekat dalam otoritarianisme. Di sisi lain, fenomena terorisme berkedok agama juga mulai menjadi isu internasional. Munculnya organisasi seperti Al-Qaeda dan ISIS berbarengan dengan arus demokratisasi di negara-negara Arab (*Arab Spring*). Radikalisme agama yang kerap berujung pada terorisme seringkali dianggap satu nafas dengan kebangkitan nasionalisme religius yang terjadi di banyak belahan dunia. Dalam konteks Indonesia, tumpang tindih pemikiran ini merupakan tantangan langsung dalam pembumih kembali nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat.

Makalah ini tidak menggunakan istilah Islam politik atau kelompok Islamis yang sering ditulis oleh sarjana Barat seperti Olivier Roy ketika menyebut kelompok Islam yang berjuang di arena politik. Istilah Islam politik terlalu sempit dan sangat mudah disalahartikan. Sebutan nasionalisme religius dianggap lebih mewakili umat Islam yang memperjuangkan aspirasi politiknya dalam sistem demokrasi. Parameternya adalah loyalitas mereka pada Pancasila dan NKRI. Dengan demikian, kelompok Islam yang memiliki retorika anti-demokrasi atau Pancasila secara otomatis bukan bagian dari nasionalis religius.

Makalah sederhana ini mencoba memetakan kembali tantangan yang dihadapi Pancasila sebagai falsafah negara yang bersifat final bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Fenomena kebangkitan kelompok pendukung nasionalisme religius tidak harus dimaknai secara tendensius sebagai bentuk pemecah belah integrasi nasional. Sebaliknya, sinergi dan harmoni harus

senantiasa dikedepankan seluruh pihak dalam pencarian bentuk nasionalisme yang paling ideal di Indonesia.

METODE

Penelitian ini berjenis kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Menurut Lexy J Moleong (2010), penelitian jenis kualitatif bertujuan untuk mencari arti atau makna dari peristiwa dan kaitannya dengan orang-orang dalam situasi tertentu. Berdasarkan definisi tersebut, penelitian ini berupaya mendapatkan pemahaman yang utuh dari permasalahan yang diteliti. Sedangkan studi kepustakaan dalam penelitian ini digunakan sebagai metode utama pengumpulan dan analisis data. Studi kepustakaan digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan segala informasi dan data melalui beragam literatur untuk mendapatkan penjelasan dan landasan teori dari permasalahan yang diteliti. Studi kepustakaan dalam penelitian ini menggunakan tahapan yang dimulai dari pengumpulan data, pembacaan data, pengolahan dan penyortiran data, serta analisis dan penyajian.

Data terkait konsep nasionalisme didapatkan dari beragam sumber literatur yang tersedia dan dapat diakses secara publik. Dari sekian banyak literatur yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian, dipilih literatur kunci yang digunakan sebagai acuan dalam pembahasan mengenai objek penelitian. Hasil penelitian dari Mark Jurgensmeyer (1998) mengenai dualisme tipologi nasionalisme global yaitu sekular dan religius dijadikan rujukan utama secara konseptual dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, perspektif nasionalisme yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada kerangka berpikir dari Mark Jurgensmeyer.

Studi literatur berikutnya dipakai untuk menjelaskan konsep sekularisme yang memiliki beragam dimensi penafsiran.

Data yang terkumpul akan digunakan untuk menjelaskan kaidah sekularisme yang mengalami pergeseran sejak awal termin ini mulai digunakan hingga hari ini. Karena berkaitan dengan frase nasionalisme-sekular yang berposisi dengan nasionalisme-religius, konsep sekular dalam penelitian ini mengacu pada kerangka berpikir Harvey Cox (1967) yang menggunakan termin sekular sebagai lawan dari religiusitas. Sedangkan data literatur lainnya disortir dan dipilih berdasarkan kerangka pembahasan yang linier dengan konsep kunci dalam penelitian. Beberapa buku, artikel ilmiah, serta jurnal daring digunakan sebagai data pelengkap yang memperkuat konsep kunci dalam penelitian.

Deskripsi konseptual mengenai nasionalisme sekular dan religius selanjutnya digunakan untuk memberikan penafsiran dan analisis pada kondisi aktual yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini. Pembacaan pada fenomena rivalitas dua kelompok yang terpolarisasi sejak Pipres 2014 mengindikasikan adanya gejala rivalitas seperti halnya konsep kunci dalam studi literatur yang dilakukan. Selain itu, fenomena dualisme penafsiran Pancasila beserta tantangan re-aktualisasinya juga mengacu sepenuhnya dari landasan konseptual yang telah disusun dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nasionalisme Sekular

Negara bekas terjajah dengan diversifikasi budaya yang tinggi seperti Indonesia memiliki tantangan yang sangat hebat dalam usaha pembentukan identitas nasional. Proses integrasi sosio-kultural serta politik dalam kerangka pembangunan pasca kemerdekaan formal adalah pekerjaan maha sulit hingga hari ini. Ketiadaan musuh bersama (*common enemy*) menjadikan potensi konflik etnis dan sektarian begitu terasa di Indonesia

sejak awal kemerdekaan formalnya. Tidak ada cara lain yang ditempuh dalam proses integrasi ini selain memancarkan ide nasionalisme di tengah-tengah masyarakat. Semangat ini seiring sejalan dengan puluhan bangsa dan negara baru di Asia Afrika yang secara bergiliran berhasil melepaskan diri secara formal dari belenggu kolonialisme Eropa.

Wacana nasionalisme ini kemudian membentuk masyarakat yang dalam konsep Benedict Anderson (2005) disebut sebagai komunitas terbayang (*imagined communities*). Disebut "terbayang" karena nasionalisme tidak lahir begitu saja secara alamiah, melainkan sebuah proyek masif dengan strategi yang terukur. Setiap entitas kelompok yang berbeda dalam satu negara diberikan imaji persatuan hingga tiap kelompok tersebut mampu membayangkan diri mereka berada dalam grup yang sama. Melalui nilai-nilai ke-Indonesiaan yang didistribusikan lewat media cetak hingga televisi, integrasi nasional bisa dibentuk dan dipertahankan.

Dalam perkembangan selanjutnya, ide nasionalisme di Indonesia dijauhkan dari corak religius agama tertentu, khususnya Islam. Corak nasionalisme yang berkembang di Indonesia hingga hari ini adalah nasionalisme sekular. Pada setiap rezim yang berkuasa, selalu terdapat tarik menarik kepentingan di antara kelompok nasionalis sekular dengan nasionalis religius. Konflik kepentingan kerap terjadi dan pada beberapa periode pemerintahan pernah melahirkan pertumpahan darah yang serius.

Fenomena ini bisa dirunut pada proses peralihan kekuasaan sejak Indonesia memasuki era kemerdekaan. Dalam ranah kajian poskolonial, bangsa-bangsa bekas terjajah seperti Indonesia memang mengalami masa transisi ideologi pasca kemerdekaan dengan segala atribut inferioritas terhadap bangsa yang pernah

menjajahnya. Nasionalisme sendiri adalah ide yang muncul dari Barat. Pasca keruntuhan Khilafah Islam di Turki pada 1924, nasionalisme seperti menjadi pilihan satu-satunya bagi bangsa-bangsa mayoritas Muslim terjajah dalam melawan kolonialisme. Padahal, sebagai sebuah gagasan Barat, nasionalisme tetap “menguntungkan” Barat. Corak sekular pada nasionalisme akan membuat corak politik menjadi terbuka dan liberal. Hal tersebut akan berimplikasi pada corak kebijakan ekonomi dan pembangunan yang juga akan menjadi terbuka dan liberal. Sistem ekonomi terbuka akan memberi jalan bagi proses hegemoni budaya, yang pada ujungnya adalah mengekalkan kepentingan ekonomi Barat di Indonesia. Nasionalisme sekular yang berkembang di Indonesia dengan demikian pada hakikatnya adalah katalisator bagi penanaman investasi Barat.

Lebih jauh lagi, menurut Gladney (1991: 113-115), nasionalisme sekular adalah rumusan pemikiran yang menghendaki loyalitas tertinggi individu dicurahkan untuk bangsa dan negara. Rumusan ini kemudian dibedah secara lebih spesifik lagi oleh Mark Juergensmeyer dalam bukunya *Menentang Negara Sekular* (1998) yang membelah dua aliran besar nasionalisme: sekular dan religius. Dalam bukunya tersebut, Juergensmeyer mengutip pendapat Nehru yang pernah meminta agar masyarakat India meninggalkan paham keagamaan yang picik untuk menerima pandangan nasionalisme sekular (Juergensmeyer, 1998: 25). Menurut para pemimpin negara poskolonial seperti Nehru di India dan Nasser di Mesir, nasionalisme sekular adalah jalan menuju masyarakat modern seperti halnya Eropa.

Untuk memahami frase nasionalisme sekular, maka perlu kiranya dipahami terlebih dahulu termin sekularisme. Sekularisme dimaknai secara

sederhana sebagai *bentuk peminggiran agama di ruang publik menuju ruang privat*. Agama dimaknai sebagai instrumen kepercayaan tradisional yang kontra produktif terhadap proses demokrasi dan liberalisasi ekonomi. Konsep sekularisme yang hari ini dipahami berasal dari sejarah yang cukup panjang. Titik tolak awalnya berada pada dinamika hubungan gereja Katolik dengan penguasa di Eropa. Dalam tradisi gereja Katolik Roma abad pertengahan, sekularisasi diartikan sebagai proses seorang rahib yang meninggalkan biara dan kembali ke tengah masyarakat. Bahkan, setelah perang panjang antara kelompok Katolik dan Protestan berakhir di abad pertengahan, sekularisasi menjadi istilah untuk proses pengambilalihan harta kekayaan milik gereja (Madung, 2017: 32).

Jika merujuk ke etimologi, kata sekular berasal dari bahasa Latin *saeculum* yang artinya zaman atau masa yang tertentu. Dahulu, kata ini digunakan untuk mendeskripsikan rentang waktu antara masa kini dan akhir zaman yang membawa ciri kehidupan harmonis antara umat Kristen dan kaum non-Kristiani untuk mengatasi persoalan-persoalan publik (Madung, 2017: 31). Jose Casanova yang dikutip oleh Madung (2017: 34) membagi sekularisasi dalam tiga bentuk pemahaman yang berkaitan dengan relasi kehidupan dengan agama. Salah satu bentuk pemahaman yang menjadi ciri dominan hingga hari ini adalah anggapan bahwa *hidup tanpa agama merupakan ciri khas kematangan dan kedewasaan manusia*.

Di sisi lain, literatur kunci konsep sekularisme modern bisa disusuri dari buku berjudul *Secular City* karya Harvey Cox yang terbit pertama kali di Amerika Serikat tahun 1965. Dalam bukunya tersebut, sekularisasi diartikan oleh Cox sebagai pembebasan manusia dari asuhan agama dan perkara metafisika. Selain itu, Cox juga menganggap sekularisasi sebagai bentuk

pengalihan perhatian manusia dari dunia lain (yang bersifat metafisik) menuju dunia kini (Cox, 1967: 15). Meskipun gagasan Cox tersebut berkembang di kalangan Barat Kristen dan menarik kesimpulan dari teks biblikal, akan tetapi pengaruhnya sampai juga pada para pemikir sekular di Indonesia bahkan kelompok cendekiawan muslim.

Kontekstualisasi ide sekularisasi dari Cox mendapatkan momentum aktualisasi penuh ketika Indonesia memasuki fase reformasi yang menjamin kebebasan berekspresi warga negara. Kelahiran organisasi semacam Jaringan Islam Liberal (JIL) menjadi katalisator pematapan ide sekularisasi agama seperti yang terjadi pada Kristen di Barat. Jauh sebelum kelahiran JIL, Nurcholis Madjid pernah melempar isu sekularisme di Indonesia secara frontal di tahun 1970-an. Gagasannya yang sangat populer saat itu adalah *Islam yes, partai Islam no!* Saat itu, ide sekularisme yang ditulis oleh Madjid digadang-gadang oleh banyak kalangan sekular-liberal sebagai pembaharuan dalam Islam.

Hamid Fahmi Zarkasy (2012: 189-190) mencatat bahwa seluruh gagasan yang disampaikan oleh Nurcholis Madjid tersebut terinspirasi langsung dari Harvey Cox. Sekalipun kontroversial dan menuai kecaman dari kelompok Islam lainnya, gagasan ini terus berkembang dan hari ini masih diperjuangkan oleh kelompok yang tergabung dalam JIL. Meskipun sasaran utamanya adalah mendekonstruksi penafsiran kitab suci Al-Quran menuju sekularisme, kelompok seperti JIL ini juga sangat mendukung wacana nasionalisme sekular yang berkembang di level politik.

Dalam konteks politik, sekularisasi melahirkan *konsep pemisahan agama dari politik praktis*. Agama ditempatkan dalam ruang privat sebagai tata nilai dan ajaran yang dilindungi. Tata kelola negara tidak didasarkan pada sakralitas kitab suci melainkan keadilan. Konsep ini bahkan

telah menjadi acuan cukup lama untuk memahami modernitas masyarakat Eropa seperti yang diulas oleh Max Weber. Keinginan untuk mengeluarkan agama dari ruang publik didasari pada konsensus, bahwa modernitas ditandai dengan semangat rasionalisasi kehidupan dan kemajuan sains. Singkatnya, *agama harus digeser dari ruang publik menuju ruang privat* (Madung, 2017: 34).

Hadirnya Jaringan Islam Liberal di Indonesia juga merupakan bentuk reaksi dari potensi sekularisasi yang kerap dihambat oleh kebangkitan kelompok nasionalis religius. Pada level yang paling dasar, kemunculan gerakan Islam liberal adalah respon terhadap sikap dualisme kelompok Islam terhadap hubungan antara agama dan negara. Lebih jauh lagi, gerakan Islam liberal berusaha memunculkan bentuk teologi yang bisa menjadi dasar bagi negara modern (Assyaukanie, 2002: xxv). Teologi yang dimaksud adalah Islam yang bercorak sekular dan memisahkan secara tegas urusan agama dan politik. Dalam keyakinan kelompok ini, urusan politik dan negara adalah urusan duniawi semata dan tidak perlu ada keterlibatan agama di dalamnya.

Sejatinya, pilihan untuk mengembangkan identitas politik nasional di Indonesia terbuka luas. Dengan representasi umat Islam yang menjadi mayoritas di negara ini, sangat wajar untuk membentuk corak pemerintahan yang formal-religius. Namun, dengan dominasi kelompok nasionalis sekular beserta instrumen kekuasaannya di negara ini, maka corak identitas kebangsaan yang dibangun pun bertendensi sekular. Di sisi lain, kelompok nasionalis religius masih terus memperjuangkan aspirasi seraya berposisi pada setiap sekularisasi yang terjadi. Dalam catatan Hedi (2019: 261), meski telah sekian lama kelompok sekular mendominasi warna politik di Indonesia, tetap saja kita belum bisa masuk dalam

kategori periode sekular yang murni, apalagi pos-sekular.

Dualisme Penafsiran Pancasila

Polarisasi di tengah masyarakat yang terjadi sejak rivalitas pencalonan Presiden antara kubu Joko Widodo dan Prabowo tahun 2014 berlanjut pada Pilkada DKI tahun 2017. Dua kelompok besar masyarakat mengidentifikasi diri mereka secara terbuka di ruang publik (baca: termasuk media daring) terkait preferensi terhadap tokoh dan dukungan politik mereka. Ketika calon gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terjerat kasus penistaan agama, polarisasi tersebut semakin mendapatkan momentum.

Aksi-aksi tuntutan terhadap Ahok dilakukan oleh kelompok umat Islam yang menghendaki penyelarasan aspirasi politik dengan cita-cita nasionalisme religius. Bedanya, umat Islam tidak terinstitusionalisasi dalam bentuk partai politik formal seperti era Orde Lama, melainkan berupa komunitas lepas dan terbuka. Klimaks dari rangkaian aksi umat Islam ini adalah demonstrasi besar pada tanggal 2 Desember 2016 di Jakarta yang menuntut agar Ahok segera diadili.

Singkat cerita, Ahok akhirnya gagal memenangi Pilkada dan harus menjalani hukuman pidana. Namun, polarisasi masyarakat tidak berhenti sampai di situ. Kelompok nasionalis sekular mengeluarkan narasi bahwa kekalahan Ahok adalah akibat politisasi agama dan rasisme yang disetir oleh para aktor politik. Sebaliknya, kelompok nasionalis religius berkeyakinan bahwa diadilinya Ahok adalah bentuk penegakkan hukum yang imparisial.

Jargon *Saya Indonesia dan Saya Pancasila* yang sering muncul belakangan ini adalah sebuah teks dari pre-teks Pilkada DKI Jakarta yang membelah masyarakat menjadi pro dan anti Ahok. Kelompok pertama adalah kubu

pendukung Ahok, termasuk di dalamnya rezim pemerintah yang menggunakan isu Pancasila sebagai propaganda visual di tengah masyarakat internet (netizen) secara masif. Dukungan terhadap Ahok yang notabene minoritas secara agama dan ras ditafsirkan sebagai dukungan terhadap nilai kebhinekaan yang ada dalam Pancasila. Sebaliknya, menolak pencalonan Ahok sebagai gubernur karena agama dan rasnya dianggap sebagai ancaman bagi keberagaman di Indonesia. Kelompok pertama ini secara gamblang memosisikan diri mereka sebagai Pancasilais sejati.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dalam seminar Pancasila dan Kebhinekaan di Universitas Gadjah Mada 6 November 2017 mengatakan bahwa ancaman terbesar bagi Pancasila adalah radikalisme dan terorisme. Dijelaskan dalam ceramahnya tersebut bahwa radikalisme ditunjukkan melalui sikap intoleran terhadap suku, agama, ras dan kelompok yang ada di masyarakat (<https://ugm.ac.id/id/news/15095>, diakses 12 Desember 2017). Pernyataan Tjahjo Kumolo ini jelas memperkuat asumsi penafsiran Pancasila dalam kerangka nasionalisme sekular yang secara praktis dikembangkan di Indonesia. Ceramah tersebut juga memperkuat asumsi penafsiran Pancasila oleh kubu pendukung Ahok.

Di sisi lain kelompok penentang Ahok juga menjadikan Pancasila sebagai landasan tuntutan mereka. Sikap Ahok yang dianggap telah melecehkan ajaran agama Islam dianggap sebagai sikap yang bertentangan dengan semangat persatuan dalam Pancasila. Dalam banyak spanduk, Ormas penentang Ahok seperti FPI (Front Pembela Islam) kerap menghubungkan tuntutan pemenjaraan Ahok dengan semangat membela Pancasila, NKRI, dan kebhinekaan. Narasi semacam ini juga banyak ditampilkan oleh para pemuka agama penentang Ahok ketika berbicara

dalam ruang publik.

Saling klaim antara dua kubu dengan latar Pancasila ini merupakan eksekusi dari persaingan antara kelompok nasionalis sekular dan religius di Indonesia. Keduanya sebenarnya memiliki visi loyalitas yang sama terhadap Pancasila dan kebhinekaan. Keduanya jauh dari narasi mengenai perubahan dasar negara, dan/apalagi penggunaan cara-cara teror dalam mencapai tujuan. Termin radikal yang sering berdampingan dengan termin teroris seharusnya dipisahkan dari konteks persaingan nasionalisme ini. Kelompok penentang Ahok yang menggunakan narasi agama dalam aksi-aksi mereka bukanlah cikal-bakal kelompok teroris seperti ISIS di Timur Tengah. Mengaitkan kelompok nasionalis religius ini dengan kelompok radikal di Timur Tengah adalah cara berpikir yang simplistis.

Hal tersebut juga dipaparkan oleh Azyumardi Azra yang mengatakan bahwa gerakan radikal di Timur Tengah tidak akan bisa berkembang di Indonesia. Menurut Azyumardi Azra (2002) setidaknya ada tiga hal perbedaan yang menjadi *raison d'être* munculnya gerakan radikal yang tidak bisa ditemui di Indonesia. Yang *pertama* adalah kondisi sosio-historis masyarakat Indonesia yang sangat berbeda dengan Timur Tengah. Secara sederhana, Islam mengalami indegenesasi dan kontekstualisasi dengan tradisi lokal masyarakat tatkala masuk ke bumi Nusantara. Hal ini menyebabkan ekspresi umat Islam di Indonesia jauh lebih akomodatif dan moderat dibandingkan saudara-saudaranya di Timur Tengah. Kondisi ini jelas merupakan lahan yang tidak subur bagi perkembangan gerakan radikal.

Kedua, sekularisasi ekstrim yang terjadi di banyak negara Timur Tengah pasca-Perang Dunia Kedua. Proyek sekularisasi yang terjadi di Turki, Iran, dan Mesir adalah contoh nyata stimulus

lahirnya gerakan radikal di kawasan tersebut. Sedangkan Indonesia memiliki Pancasila yang justru mengakomodasi moral religius melalui sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Pancasila dianggap sudah final dan oleh karena itu, perdebatan terkait ideologi negara pun tidak relevan. Hal ini tentu saja menihilkan peluang bangkitnya radikalisme yang ingin mengubah struktur negara di tataran ideologi.

Ketiga, gaya kepemimpinan rezim-rezim penguasa di Timur Tengah yang cenderung sangat opresif terhadap lawan politik dan oposisi mereka. Para penguasa di kawasan tersebut sering menggunakan pendekatan kekerasan dalam menumpas dan menghabisi lawan politik mereka. Gaya semacam ini sering menimbulkan serangan balasan yang kemudian beraliansi dengan kelompok radikal dan teror. Kondisi semacam itu tidak ditemui di Indonesia, tidak terkecuali pada masa pemerintahan Presiden Soeharto di era Orde Baru yang sering disebut *soft oppressive regime*. Terlepas dari banyaknya catatan kekerasan negara terhadap kelompok Islam di era Orde Baru, rezim ini tetap lebih akomodatif dan rekonsiliatif terhadap kepentingan umat Islam.

Berdasarkan pemaparan tersebut, kemunculan banyaknya parpol Islam di era reformasi termasuk di dalamnya kelompok yang berdemonstrasi menentang Ahok bukanlah sebuah indikasi lahirnya gerakan radikal yang mesti diantisipasi "serius" oleh pemerintah. Pilihan untuk menyampaikan pendapat melalui demonstrasi adalah metode yang konstitusional dan demokratis, satu hal yang tidak mungkin terdapat pada kelompok radikal. Absennya partai politik Islam secara langsung dalam aksi massa tersebut justru menggambarkan dinamika yang menarik dalam relasi kelompok nasionalis sekular dan religius yang dalam catatan sejarah justru seringkali termanifestasi dalam

rivalitas elit partai politik.

Sebagai catatan, pasca Pemilu tahun 1999, PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) sebagai pengusung nasionalisme sekular pernah memenangi mayoritas kursi di Parlemen. Akan tetapi, gabungan partai-partai Islam berusaha mencegah terpilihnya Megawati sebagai Presiden. Saat itu, kedua kubu ini menggunakan mitos yang sama yaitu; *suara terbanyak*. Saat itu, PDI-P mengklaim sebagai pemilik suara terbanyak di Indonesia karena partai mereka menang Pemilu. Sebaliknya, gabungan parpol Islam juga mengklaim sebagai pemilik suara terbanyak karena umat Islam adalah mayoritas. Eskalasi konflik memuncak ketika beberapa tokoh parpol Islam mewacanakan pembentukan fraksi Islam di MPR untuk menjegal Megawati. Sebagai respon, massa pendukung PDI-P di Jawa Timur melakukan aksi cap jempol darah untuk mengamankan aspirasi mereka (Kuntowijoyo dalam Noer (et. al.), 1999: 315-316)

Ketegangan situasi pada saat itu bisa saja berujung pada bentrokan berdarah seandainya tidak ada kedewasaan di antara para tokoh politik di tingkat elit oposisi yang kemudian melahirkan poros tengah. Eskalasi konflik semacam itulah yang kali ini harus dihindari ketika PDI-P kembali menjadi pemenang Pemilu dengan Joko Widodo sebagai Presiden terpilih. Pertarungan kelompok nasionalis sekular dan religius kembali mendapatkan panggung dengan rentetan kontestasi sejak Pilpres 2014 hingga Pilkada DKI 2017. Terlepas dari kepentingan tiap-tiap kelompok menuju pesta demokrasi selanjutnya di tahun 2019, pertarungan ini tidak boleh sampai memicu disintegrasi bangsa.

Dualisme penafsiran Pancasila juga kembali terjadi pada isu LGBT yang belum lama ini marak dibicarakan. Sekelompok masyarakat yang beraliansi

dengan ormas-ormas Islam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk memperluas tafsir pidana bagi pelaku pencabulan dan perzinahan kepada kelompok homoseksual. Meskipun pada akhirnya MK menolak gugatan tersebut dengan berbagai catatan, polarisasi kembali terlihat di tengah masyarakat.

Pada isu tersebut, kelompok nasionalis religius berdalih dengan Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi untuk menjadikan perilaku homoseksualitas sebagai delik pidana. Mereka beranggapan bahwa negara yang berdasarkan Pancasila tentu saja harus mendukung tegaknya moral berdasarkan religiusitas (ketuhanan) yang hidup di masyarakat. Dalam pandangan mereka, perilaku homoseksual tidak mendapatkan tempat di ajaran agama manapun, terlebih Islam. Dengan demikian, perilaku homoseksual harus diberikan perlakuan yang sama seperti pidana perjudian, pelacuran, dan narkoba yang juga bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Di sisi lain, kelompok nasionalis sekular berlindung pada asas kemanusiaan yang telah disepakati secara universal dan diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Kelompok ini menganggap bahwa substansi dari kebhinekaan adalah menerima segala macam perbedaan manusia yang hidup di bumi Indonesia, tanpa terkecuali. Bagi mereka, Pancasila adalah simbol persatuan yang tidak seharusnya digunakan secara sepihak oleh sekelompok orang yang berbicara atas nama agama. Lebih jauh, salah satu bagian dari kelompok nasionalis sekular ini bahkan mendekonstruksi dalil-dalil keislaman terkait homoseksual. Mereka yang tergabung dalam JIL (Jaringan Islam Liberal) misalnya, sering mengeluarkan narasi tentang tidak adanya keharusan untuk menolak homoseksual dalam ajaran Islam. Hal ini tentu saja memicu konfrontasi pemikiran yang serius antara kelompok nasionalis sekular dengan religius.

Dari pemaparan di atas, setidaknya dualisme pemaknaan Pancasila harus diupayakan agar tidak berujung pada rusaknya kohesi sosial dan disintegrasi bangsa. Setiap letupan dan kontraksi antara dua kelompok ini merupakan proses pendewasaan kita sebagai bangsa dan negara. Yang harus dipastikan adalah tegaknya supremasi hukum di tengah segala perdebatan. Oleh sebab itu, kepatuhan pada hukum positif dan konstitusi yang berlaku harus diberikan apresiasi mendalam di tengah persaingan kedua kelompok ini. Cara-cara yang demokratis dalam mencapai tujuan harus menjadi acuan dan teladan bagi setiap kelompok yang terlibat.

Di sisi lain, dualisme kelompok dalam penafsiran Pancasila ini juga kemudian mewujudkan pada munculnya *labelling* dan sinisme melalui sebutan “cebong” dan “kampret”. Cebong adaah sebutan untuk para pendukung Jokowi yang mewakili kelompok nasionalis sekular. Sedangkan kampret adalah sebutan untuk pendukung Prabowo yang banyak didukung oleh kelompok nasionalis religius. Dalam temuan M.Tazri (2019: 5), sinisme dan *labelling* ini adalah situasi yang tidak sehat dalam pendewasaan demokrasi kita yang berada dalam kultur ke-Timuran. Lebih jauh lagi, fenomena ini merupakan ancaman integrasi yang nyata dirasakan oleh masyarakat.

Tantangan Re-aktualisasi

Di tengah maraknya radikalisme dan terorisme atas nama agama, aktualisasi Pancasila harus diarahkan pada strategi jangka panjang pemberantasan terorisme itu sendiri. Beberapa faktor utama yang memicu terorisme adalah kemiskinan, ketidakadilan, dan ketidakstabilan politik. Ketiga hal tersebut kerap dijadikan justifikasi sebuah gerakan perubahan yang

menggunakan pendekatan teror untuk mencapai tujuan. Faktor *pertama* adalah kemiskinan yang harus segera diberantas. Mengutip pendapat Imam Ghazali yang mengatakan bahwa *kefakiran (kemiskinan) mendekatkan seseorang pada kekufuran*. Dengan kata lain, semakin miskin seseorang, semakin ia rentan untuk meninggalkan ajaran agamanya. Dalam konteks terorisme, kelompok masyarakat miskin jauh lebih rentan untuk direkrut menjadi pelaku teror. Sedangkan terorisme jelas bukan bagian dari ajaran agama. Sederhananya, negara harus mengaktualisasikan Pancasila dalam pembangunan untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia.

Terkait dengan hal tersebut, doktrin filsafat Pancasila memang tidak bersifat teknis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itulah perlu dilakukan edukasi yang masif bahwa Pancasila menjadi ruh keadilan pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat. Negara harus menjamin terdistribusinya kesejahteraan dan meratanya pembangunan bagi seluruh rakyat. Pada sisi lain, setiap keberhasilan pembangunan yang telah dicapai harus senantiasa dikaitkan dengan terwujudnya sila kelima dari Pancasila, “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Propaganda positif semacam itu akan mengecilkan ruang kaderisasi gerakan radikal/teror yang kerap menasar kelompok masyarakat kelas bawah.

Pendekatan yang sedikit berbeda diberlakukan pada napi bekas teroris. Program de-ideologisasi kepada mereka hampir pasti akan sia-sia. Hal tersebut dikarenakan proses internalisasi nilai keislaman radikal yang sudah begitu meresap pada benak mantan teroris tersebut. Doktrin Pancasila dan demokrasi akan sangat sulit masuk dalam logika kebenaran yang mereka anut. Jangankan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai keislaman

saja mereka mentahkan apabila da'i yang menyampaikannya bukan bagian dari kelompok mereka. Namun, pendekatan kemanusiaan seperti pemenuhan kebutuhan ekonomi dan pekerjaan justru bisa jauh lebih efektif dalam mencegah radikalisme (Asrori, 2015: 265).

Kedua, Pancasila juga harus diaktualisasikan pada kondisi yang netral kepentingan politik kelompok. Negara tidak sepatutnya ikut mengambil bagian dari dualisme penafsiran Pancasila yang terjadi di tengah masyarakat. Meskipun ujung perseteruan itu adalah politik praktis, negara harus tetap menjadikan Pancasila sebagai nilai yang sakral dan bukan semata-mata alat untuk memenangkan kepentingan rezim. Perlu kiranya untuk belajar dari apa yang terjadi selama masa Orde Baru ketika Pancasila dijadikan asas tunggal untuk mengekalkan kekuasaan saat itu. Korupsi dan militerisme dipraktikkan terang-terangan oleh negara seraya mempropagandakan nilai-nilai Pancasila. Beruntung, reformasi yang menumbangkan Orde Baru tidak sampai berujung pada ide merevisi Pancasila. Publik teredukasi dengan baik bahwa kesalahan bukan berada pada nilai-nilai Pancasila melainkan rezim pemerintahan Orde Baru yang koruptif.

Pola sederhana yang bisa dilihat saat ini adalah kelompok nasionalis sekular menjadi penyokong pemerintah dan kelompok nasionalis religius menjadi oposisi meski tidak seluruhnya. Pada kondisi semacam ini, negara harus mengakomodasi kepentingan tiap kelompok tanpa harus berpihak secara terbuka. Keberpihakan negara pada kelompok *rulling elite* dengan menggunakan "Pancasila" akan mereduksi kepercayaan kelompok oposisi (nasionalis religius) terhadap Pancasila itu sendiri. Pada titik ekstrim, ketidakpercayaan ini bisa berujung pada instabilitas politik dan secara otomatis menjadi lahan subur tumbuhnya gerakan radikal dan teror.

Kelompok nasionalis religius sendiri harus terus mengedukasi diri agar tetap menaruh kepercayaan terhadap Pancasila. Kisah-kisah heroik perjuangan para pendiri bangsa yang sebagiannya adalah kelompok nasionalis religius harus terus digali dan disampaikan kepada kelompok ini. Dinamika yang terjadi pada proses kelahiran Pancasila adalah bagian faktual dari sejarah yang tidak bisa dijadikan dasar legitimasi ketidakpercayaan. Kelompok nasionalis religius pada masa itu justru tidak pernah menggugat Pancasila sebagai dasar negara sejak ia ditetapkan. Pancasila bersifat final dan lahir sebagai *gentlemen agreement* antara seluruh pihak untuk berkomitmen pada integrasi nasional.

Tantangan reaktualisasi yang *ketiga* adalah komitmen pada demokrasi untuk menjamin stabilitas politik. Kelompok nasionalis religius yang berafiliasi pada parpol Islam adalah mereka yang memberi kepercayaan pada demokrasi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Demokrasi yang dijiwai oleh sila keempat dari Pancasila harus dilaksanakan dengan penuh komitmen. Hubungan antara demokrasi dengan komunitas Islam politik memang penuh lika-liku. Sekalipun demikian, mengutip pendapat Riza Sihbudi (2007), kelompok Islam menganggap demokrasi bukanlah satu-satunya sistem yang benar melainkan satu-satunya cara untuk meraih kemenangan.

Meski karakter masyarakat Indonesia berbeda dengan Timur Tengah, ada baiknya mengambil pelajaran dari beberapa kejadian sejarah demokratisasi di kawasan tersebut. Seringkali, demokrasi yang menyediakan jalan bagi kelompok nasionalis religius untuk berkuasa dibajak tepat ketika kelompok tersebut berhasil menang Pemilu. Sebagai contoh, tahun 1991 di Aljazair, Partai FIS (*Front Islamique du Salut*) yang berideologi Islam berhasil memenangkan Pemilu secara demokratis di negara tersebut.

Namun, rezim petahana menggunakan kekuatan militer untuk menghabisi partai FIS dan merebut kekuasaan. Hal serupa terjadi pula di Palestina ketika Partai Hamas (*Harakatul Muqawwamah al-Islamiyah*) berhasil menang mutlak pada Pemilu tahun 2006. Saat itu, Israel dan Amerika Serikat melakukan boikot pada Palestina sehingga kekuasaan Hamas menjadi lumpuh dan mendesak rakyat Palestina untuk menggulingkan rezim Partai Hamas. Contoh terbaru adalah yang terjadi pada Mesir ketika Partai Ikhwanul Muslimin menang pemilu tahun 2013. Tokoh militer dari rezim pendahulu melakukan kudeta berdarah untuk merebut kekuasaan dari Partai Ikhwanul Muslimin di Mesir saat itu. Bahkan, Partai Ikhwanul Muslimin dibubarkan serta para tokohnya diadili.

Rentetan peristiwa pengkhianatan terhadap komitmen demokrasi yang terjadi di negara-negara Timur Tengah justru telah menyuburkan aksi radikalisme dan terorisme di kawasan tersebut. Kepercayaan sebagian kelompok Islam yang pada awalnya yakin terhadap proses demokrasi mendadak ambruk begitu saja. Mereka enggan terlibat lagi dalam demokrasi karena kerap dikhianati terutama ketika mereka sudah sampai pada kemenangan. Satu-satunya yang bisa menekan ketidakpercayaan kelompok Islam terhadap demokrasi saat ini adalah rezim Partai AKP di Turki. Keberhasilan Partai AKP mempertahankan dua periode kekuasaan sejak kemenangan Pemilu tahun 2002 membangkitkan rasa percaya diri kelompok Islam di kawasan lain untuk tetap berada dalam sistem demokrasi.

Hal yang lebih ironis adalah standar ganda yang sering dipraktikkan oleh negara adidaya seperti Amerika Serikat terkait demokrasi di dunia Islam. Standar ganda ini terlihat ketika negara-negara

Tidak hanya nasionalisme, bangsa ini juga memerlukan statuta untuk

yang jelas-jelas tidak demokratis justru malah didukung dan dijadikan sekutu. Pada beberapa kudeta berdarah, Amerika Serikat bahkan terlibat secara aktif di dalamnya. Sebaliknya, negara-negara yang demokratis sekalipun akan "dimusuhi" apabila Pemilu mereka dimenangkan oleh kelompok Islam (Sukarwo, 2009). Standar ganda ini adalah contoh buruk kebijakan luar negeri Amerika Serikat sebagai negara yang getol mengampanyekan nilai-nilai demokrasi ke seluruh dunia.

Berdasarkan catatan di atas, aktualisasi Pancasila harus mempertegas komitmen seluruh pihak dalam penegakkan nilai demokrasi yang dijiwai oleh sila keempat. Demokrasi telah dipilih sebagai sistem politik untuk kepentingan suksesi kepemimpinan di Indonesia. Tidak boleh ada standar ganda dan konspirasi seperti yang sering terjadi di rezim negara-negara Timur Tengah. Nilai-nilai demokrasi liberal ala Amerika Serikat harus dikorelasikan dengan asas partikularisme yang berlaku di Indonesia. Pada titik itulah, peran Pancasila menjadi sangat vital untuk membentuk corak demokrasi yang paling ideal bagi rakyat Indonesia.

SIMPULAN DAN SARAN

Sebagai sebuah bangsa yang pernah dijajah, mentalitas rakyat Indonesia harus terus dibangun menuju kemerdekaan yang hakiki. Krisis identitas adalah bagian dari proses pembentukan mentalitas bangsa dan negara yang tidak perlu terlalu dirisaukan. Ditambah lagi, tingkat keberagaman suku, agama, ras, dan budaya di Indonesia yang memang sangat tinggi. Hal itu membuat ide nasionalisme menjadi satu-satunya perekat yang membangun kesadaran rakyat untuk melanjutkan perjuangan pasca penjajahan.

menyatukan seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan. Untuk itulah lahir

Pancasila yang telah melalui proses panjang dan pelik dari para *founding fathers* negara ini. Pancasila dan nasionalisme adalah dua hal yang tidak boleh terpisahkan dalam pembangunan. Meskipun tendensi nasionalisme yang ada sampai hari ini lebih mengarah pada gaya sekular, hal tersebut tidak boleh menjadi sumber disintegrasi.

Tendensi sekular pada penerapan nasionalisme di Indonesia merupakan eksekusi langsung dari trauma pos-kolonial yang kerap terjadi pada bangsa-bangsa dunia ketiga. Makalah ini mencoba memetakan tantangan aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Fenomena persaingan antara kelompok nasionalis sekular dan religius adalah momentum untuk saling mendewasakan diri demi terwujudnya kesejahteraan bangsa. Persaingan ini bahkan sudah ada sejak kemerdekaan Indonesia masih dalam tahap persiapan. Tidak ada yang perlu dirisaukan dari persaingan ini selain terus menjaga agar Pancasila tidak menjadi rangkaian kalimat tanpa makna. Pembangunan juga harus merata dan angka kemiskinan harus terus ditekan.

Kelompok nasionalis religius yang belakangan ini sering memobilisasi massa seraya *show force* di ruang publik bukanlah cikal bakal kelompok radikal dan teroris. Salah satu titik perbedaan utama antara kelompok ini dengan teroris adalah loyalitas mereka pada Pancasila sebagai dasar negara. Menganalogikan kelompok ini dengan kelompok radikal dan teroris adalah sebuah cara berpikir yang simplistis. Cara-cara demokrasi dan konstitusional yang selama ini ditempuh oleh mereka merupakan bukti jauhnya analogi tersebut. Bahkan, hal ini pernah dicontohkan oleh jajaran elite Partai Masjumi tatkala partai ini dibubarkan oleh rezim Orde Lama serta para tokohnya dipenjarakan. Saat itu, tidak ada seruan untuk

memberontak pada pemerintah, melainkan tetap mengikuti aturan hukum yang berlaku. Ketika pada akhirnya tetap kalah, para elite tokoh Masjumi menyerukan agar dakwah tetap dilanjutkan melalui jalur non-politik (Artawijaya, 2014: 37-38).

Karena itulah, bola panas aktualisasi Pancasila justru berada di tangan pemerintah. Negara perlu bersikap adil dalam menyikapi setiap kelompok yang sedang berdialektika. Pancasila harus bisa menjamin kebebasan tiap kelompok untuk menyalurkan aspirasi mereka dalam ruang demokrasi. Diperlukan komitmen penuh dari seluruh pihak agar proses demokratisasi yang ada berlangsung dengan baik sesuai amanah reformasi. Keberpihakan dan ketidakadilan negara pada salah satu kelompok justru akan kontra produktif dalam reaktualisasi Pancasila di tengah-tengah masyarakat.

Untuk merajut integrasi nasional yang positif di tengah kontestasi dan rivalitas, perlu kiranya merenungi pemikiran Jurgen Habermas tentang bentuk hubungan yang harus dijalin antara kelompok sekular dan religius dalam masyarakat modern. Dalam sebuah makalah yang dipresentasikan pada seminar internasional di Istanbul tahun 2008, Habermas menulis “...*that both religious people and secularist people should not exclude each other, but to learn from one another and coexist tolerantly*”. (<https://www.resetdoc.org/story/a-post-secular-society-what-does-that-mean/>, diakses 20 Juli 2017).

Sebagai saran untuk penelitian lanjutan terkait dengan tema dan objek yang serupa, ada baiknya melakukan mengombinasikan metode (*mix methods*) kualitatif dan kuantitatif. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih valid dan akurat mengenai peta penafsiran dan aktualisasi Pancasila di tengah masyarakat yang terpolarisasi karena politik praktis.

PUSTAKA ACUAN

- Anderson, B. 2008. *Imagined Communities: Komunitas-Komunitas Terbayang*. Yogyakarta: Insist Press.
- Artawijaya. 2014. *Belajar dari Partai Masjumi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Asrori, A. 2015. "Radikalisme di Indonesia: Antara Historisitas dan Antropositas". *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*. Volume 9, No.2 Desember 2015.
- Assyaukanie, L (ed). 2002. *Wajah Liberal Islam Indonesia*. Jakarta: Jaringan Islam Liberal.
- Azra, A. 2002. *Konflik Baru Antar Peradaban Globalisasi, Radikalisme & Pluralitas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Cox, H. 1967. *The Secular City: Secularization and Urbanization in Theological Perspective*. New York: The Macmillan Company.
- Gladney, D. 1991. *Muslim Chinese: Ethnic Nationalism in the People's Republic*. Universitas Harvard: Cambridge.
- Hedi. "Agama dalam Masyarakat Post-Sekularisme Jurgen Habermas". *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*. Volume 3, No.2. 2019
- Juergensmeyer, M. 1998. *Menentang Negara Sekular: Kebangkitan Global Nasionalisme Religius*. Bandung: Mizan.
- Madung, O.G. 2017. *Post Sekularisme: Toleransi dan Demokrasi*. Maumere: Ledalero.
- Moleong, L.J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Noer, D (et. al.). 1999. *Mengapa Partai Islam Kalah?: Perjalanan Politik Islam dari Pra-Pemilu '99 sampai Pemilihan Presiden*. Jakarta: Alvabet.
- Sihbudi, R. 2007. *Menyandera Timur Tengah: Ketidakbijakan AS dan Israel Atas Negara-Negara Muslim*. Bandung: Mizan.
- Sukarwo, W. 2009. *Tentara Bayaran AS di Irak: Sebuah Konspirasi Neoliberal AS untuk Memimpin Dunia*. Jakarta: GagasMedia.
- Tazri, M. 2019. "Cebong dan Kampret dalam Perspektif Komunikasi Politik Indonesia". *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis*. Volume 3, No.1, 2019.
- Zarkasy, H.F. 2012. *Misykat: Refleksi tentang Westernisasi, Liberalisasi, dan Islam*. Jakarta: Insists dan MIUMI.